



Penerapan Pengendalian Internal dalam Audit Piutang Usaha untuk Meminimalisir Piutang Tak Tertagih pada Puskesmas

Ameilia Budi Ifanisari^{1*}, Condro Widodo²

^{1,2}UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

22013010327@student.upnjatim.ac.id¹, condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id²

Korespondensi penulis: 22013010327@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of internal control in the receivables audit process and evaluate its effectiveness in minimizing the risk of bad debts in a health center environment. Receivables, especially those originating from health services to JKN participants and general patients, can cause problematic receivables if not managed effectively. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection through observation, interviews and documentation review during the audit by a public accounting firm. The results of the study indicate that there are still weaknesses in the internal control structure such as suboptimal separation of duties, an unintegrated receivables information system and a weak bad debt reserve policy. In addition, late payments by third parties and poor patient administration knowledge are also external factors that influence the high risk of bad debts. Therefore, improving the internal control system, implementing information technology and strengthening coordination with the guarantor are very important to reduce the risk of bad debts and increase accountability for financial management in the health center environment.*

Keywords: *audit, bad debts, debtors, health center, internal control,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengendalian internal dalam proses audit piutang dan mengevaluasi efektivitasnya dalam meminimalkan risiko piutang tak tertagih di lingkungan puskesmas. Piutang terutama yang berasal dari pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dan pasien umum dapat menimbulkan piutang bermasalah jika tidak dikelola secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumentasi selama audit oleh kantor akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam struktur pengendalian internal seperti pemisahan tugas yang belum optimal, sistem informasi piutang yang belum terintegrasi dan kebijakan pencadangan piutang tak tertagih yang masih lemah. Selain itu, keterlambatan pembayaran oleh pihak ketiga dan pengetahuan administrasi pasien yang kurang baik juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi tingginya risiko piutang tak tertagih. Oleh karena itu, perbaikan sistem pengendalian internal, penerapan teknologi informasi dan penguatan koordinasi dengan pihak penjamin sangat penting untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan puskesmas.

Kata kunci: audit, debitur, pengendalian internal, piutang tak tertagih, puskesmas

1. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan dunia bisnis saat ini, piutang usaha memegang peranan krusial sebagai aset lancar yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui penjualan barang atau jasa secara kredit (Fauzan & Mustaidah, 2021). Pada konteks Puskesmas, piutang ini muncul dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebelum pembayaran diterima, baik melalui sistem kredit maupun penagihan ke pihak ketiga seperti asuransi.

Pengelolaan piutang usaha yang tidak efektif dapat menimbulkan risiko signifikan, terutama dalam bentuk piutang tak tertagih yang berpotensi menggerogoti profitabilitas dan stabilitas keuangan perusahaan (Rianingsih et al., 2023). Di Puskesmas, hal ini dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diberikan dengan klaim yang diajukan, atau ketika terjadi keterlambatan pembayaran dari pihak penjamin.

Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi, serta berperan sebagai landasan utama dalam mengurangi risiko atas piutang tak tertagih. (Krisdianti & Supriatna, 2022). Pada tingkat Puskesmas, pengendalian internal ini mencakup prosedur verifikasi kepesertaan, pencatatan pelayanan yang akurat, dan rekonsiliasi berkala antara catatan medis dengan klaim yang diajukan.

Pengendalian internal mencakup serangkaian kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen guna menjamin perlindungan terhadap aset perusahaan, informasi akuntansi akurat dan andal, serta kegiatan operasional berjalan efisien dan efektif (Nugraha et al., 2020). Dalam konteks Puskesmas, hal ini diwujudkan melalui pemisahan tugas antara petugas pelayanan, petugas pencatatan, dan petugas penagihan, serta penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Audit piutang usaha, sebagai bagian integral dari proses pengendalian internal, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan piutang usaha, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna mengurangi kemungkinan terjadinya piutang tak tertagih. Pada audit Puskesmas, pengendalian internal mencakup pemeriksaan terhadap proses verifikasi kepesertaan, ketepatan pengkodean tindakan medis, dan ketepatan waktu pengajuan klaim.

Audit piutang usaha, sebagai bagian integral dari proses pengendalian internal, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan piutang usaha, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih. Sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam mendukung upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik (Damayanti, 2020). Penerapan sistem pengendalian internal yang baik di Puskesmas tidak hanya menjamin akurasi laporan keuangan tetapi juga mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran kesehatan masyarakat.

Penelitian mengenai implementasi audit piutang usaha di lingkungan Puskesmas masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan audit serta penerapan prosedur pemeriksaan terhadap akun piutang usaha yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik pada Puskesmas. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengevaluasi tingkat efektivitas sistem pengelolaan piutang dalam upaya mendukung terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu proses yang menyatu dengan aktivitas organisasi dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan oleh organisasi (Sia, 2019). Proses ini melibatkan sejumlah komponen yang saling berhubungan, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Pengendalian internal melibatkan aktivitas pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis (Omposunggu et al., 2019). Pemantauan ini dapat dilakukan melalui review berkala oleh manajemen, audit internal, maupun mekanisme pengawasan lainnya untuk mendeteksi kelemahan secara dini dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dalam konteks organisasi sektor publik seperti Puskesmas, pengendalian internal yang efektif menjadi kunci penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik.

Audit

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar audit yang berlaku. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa audit merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti sebagai dasar informasi dalam laporan keuangan, dengan cara menelusuri serta mengungkapkan informasi secara nyata. (Arista et al., 2023)

Piutang Usaha

Piutang usaha termasuk dalam aset lancar yang nilainya cukup signifikan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Namun, piutang usaha juga memiliki tingkat risiko yang tinggi karena adanya ketidakpastian dalam penagihannya, sehingga memerlukan kebijakan bisnis yang tepat untuk pengendaliannya. Jika piutang tidak tertagih, dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan (Seftiani & Retnowati, 2021). Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal atas piutang usaha menjadi sangat penting guna mencegah potensi kerugian dan menjaga kelancaran operasional perusahaan.

Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih merupakan representasi finansial dari penjualan kredit yang dianggap tidak dapat direalisasikan menjadi kas karena berbagai faktor seperti insolvensi pelanggan, sengketa komersial yang tidak terselesaikan, atau kegagalan dalam upaya penagihan. Piutang tak tertagih dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diakui dan meningkatkan beban penghapusan piutang. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya piutang tak tertagih adalah tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan penagihan piutang oleh perusahaan (Fitriargo et al., 2022)

Hubungan Pengendalian Internal dengan Audit Piutang Usaha

Pengendalian internal yang efektif menjadi landasan bagi pelaksanaan audit piutang usaha yang komprehensif dan efektif (Diana, 2022). Pengendalian internal yang kuat akan meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan piutang usaha, sehingga memudahkan auditor dalam melaksanakan pengujian substantif dan memberikan opini yang andal. Audit piutang usaha, pada gilirannya, memberikan umpan balik berharga

bagi manajemen dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Dengan demikian, terdapat hubungan simbiosis mutualisme antara pengendalian internal dan audit piutang usaha dalam meminimalkan untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih serta menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran secara mendalam penerapan pengendalian internal dalam audit piutang usaha pada Puskesmas yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana peran sistem pengendalian internal dalam mengurangi risiko terjadinya piutang tak tertagih pada institusi pelayanan publik, khususnya Puskesmas yang memiliki karakteristik operasional dan sumber pendanaan yang berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Data diperoleh melalui observasi langsung selama proses audit, wawancara dengan auditor dan pihak manajemen Puskesmas, serta penelaahan terhadap dokumen audit seperti kertas kerja pemeriksaan, laporan keuangan, dan kebijakan pengelolaan piutang. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola pengendalian yang diterapkan dan efektivitasnya dalam mendukung ketertagihan piutang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis mengenai peran audit dan pengendalian internal dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan piutang di sektor layanan kesehatan publik.

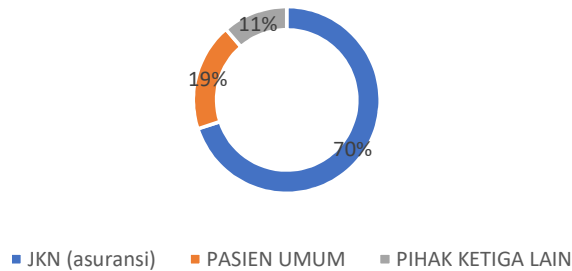
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Puskesmas

Puskesmas X merupakan unit pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Puskesmas X memiliki piutang yang timbul dari pelayanan kesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pasien umum. Piutang tersebut terutama berasal dari klaim asuransi yang dibayarkan secara berkala berdasarkan proses verifikasi oleh pihak ketiga.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan pengamatan yang terdapat pada lembar kerja “Piutang dan Piutang Lain-lain”, audit piutang di Puskesmas X dilakukan melalui serangkaian prosedur analitis dan substantif, seperti membandingkan saldo piutang antar periode, menganalisis umur piutang, dan menelaah rasio dan pola penagihan piutang yang telah jatuh tempo. Prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan piutang yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komposisi Piutang



Berdasarkan diagram komposisi piutang, diketahui bahwa sebagian besar piutang Puskesmas X berasal dari JKN (70%), diikuti oleh pasien umum (18,7%), dan pihak ketiga lain (11,3%). Menunjukkan bahwa ketergantungan terbesar Puskesmas berada pada klaim asuransi, sehingga efektivitas proses verifikasi dan pencairan klaim sangat mempengaruhi tingkat kolektibilitas piutang secara keseluruhan.

Penerapan Pengendalian Internal pada Audit Piutang Usaha

Audit piutang usaha Puskesmas X dilakukan berdasarkan prosedur audit yang meliputi pendekatan analitis dan substantif, dengan mempertimbangkan tingginya risiko piutang tak tertagih, terutama dari sumber piutang klaim JKN dan non JKN. Berdasarkan dokumen kertas kerja audit, pengendalian internal yang menjadi perhatian utama auditor meliputi tiga aspek utama, yaitu pemisahan tugas, otorisasi transaksi piutang, dan pemantauan berkala terhadap umur piutang. Salah satu prosedur audit yang dilakukan auditor adalah membandingkan saldo piutang antar periode dan melakukan analisis terhadap jadwal umur piutang. Prosedur ini memungkinkan auditor untuk mendeteksi kesalahan seperti peningkatan piutang yang tidak sesuai dengan tingkat pelayanan, serta piutang yang menunggak lebih dari 90 hari tanpa upaya penagihan yang memadai, dapat menjadi indikator lemahnya pengendalian dalam proses penagihan dan tindak lanjut klaim kepada pihak terkait.

Pengendalian internal juga dinilai dari penerapan kebijakan otorisasi dan pencatatan. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat kelemahan pada pemisahan fungsi antara pencatatan, penagihan, dan persetujuan transaksi piutang. Beberapa proses administrasi masih dilakukan secara manual tanpa pengawasan silang, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, manipulasi data piutang, atau terjadinya piutang fiktif. Padahal, menurut kerangka kerja COSO, salah satu komponen pengendalian internal yang paling esensial adalah adanya struktur organisasi yang mendukung pengendalian internal secara independen.

Auditor juga melakukan telaah terhadap kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang diterapkan oleh manajemen Puskesmas. Dari hasil telaah tersebut, ditemukan bahwa tidak terdapat dasar yang kuat dalam menentukan besarnya cadangan piutang, serta tidak terdapat analisis historis realisasi piutang sebagai dasar kebijakan. Ketidakakuratan dalam pencadangan dapat menyebabkan laporan keuangan menyajikan nilai piutang yang terlalu optimis dan tidak mencerminkan nilai realisasi yang wajar.

Prosedur substantif seperti konfirmasi piutang dengan cara sampling, telaah dokumen penagihan, dan pemeriksaan jurnal penyesuaian juga diterapkan oleh auditor untuk memastikan kewajaran saldo piutang yang dilaporkan. Dari penerapan prosedur tersebut, ditemukan bahwa dokumentasi pendukung piutang masih belum konsisten, beberapa bukti tagihan belum lengkap, dan terdapat perbedaan antara jumlah tagihan di sistem dengan dokumen fisik, yang mengindikasikan adanya kelemahan sistem informasi piutang yang digunakan.

Aspek yang Diaudit	Temuan	Implikasi
Pemisahan Tugas	Pencatatan, penagihan, dan otorisasi masih ditangani oleh pihak yang sama	Meningkatkan risiko manipulasi, kesalahan pencatatan, dan terjadinya piutang fiktif
Sistem Informasi Piutang	Masih manual, belum terintegrasi	Proses lambat, rawan kehilangan dokumen, kesalahan rekonsiliasi
Pemantauan Umur Piutang	Jadwal umur piutang tidak di-update secara berkala	Piutang jatuh tempo sulit dimonitor, menurunkan efektivitas penagihan
Dokumentasi Penagihan	Dokumen pendukung tidak lengkap, perbedaan antara sistem dan bukti fisik	Menimbulkan ketidakpastian atas kewajaran saldo piutang
Konfirmasi dan Prosedur Substantif	Beberapa hasil konfirmasi menunjukkan piutang >90 hari belum tertagih	Menunjukkan lemahnya tindak lanjut klaim dan risiko meningkatnya piutang tak tertagih
Dokumentasi Penagihan	Dokumen pendukung tidak lengkap, perbedaan antara sistem dan bukti fisik	Menimbulkan ketidakpastian atas kewajaran saldo piutang

Hasil audit secara umum menunjukkan bahwa pengendalian internal atas piutang di Puskesmas X belum berjalan secara efektif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan tata kelola piutang, antara lain pembentukan unit khusus pengelolaan piutang, penggunaan sistem informasi terpadu, dan penguatan fungsi audit internal sebagai bagian dari pengawasan rutin. Tanpa pengendalian yang memadai, risiko piutang tak tertagih akan terus meningkat, dan dapat berdampak pada arus kas serta keberlangsungan operasional Puskesmas.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih di Puskesmas X merupakan salah satu permasalahan yang cukup penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal transparansi dan efisiensi penagihan pendapatan. Berdasarkan hasil audit dan pengamatan selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya risiko piutang tak tertagih yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal.

Secara internal, faktor utama yang mempengaruhi piutang tak tertagih adalah lemahnya sistem pengendalian internal, terutama dalam aspek pemantauan piutang dan pencatatan transaksi. Ditemukan bahwa belum adanya sistem informasi piutang yang terintegrasi, sehingga proses penagihan dan verifikasi masih dilakukan secara manual, tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kesalahan pencatatan dan hilangnya dokumen pendukung tagihan. Tidak adanya jadwal piutang yang diupdate secara berkala juga membuat manajemen kesulitan dalam memantau umur piutang, sehingga piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo cenderung luput dari tindak lanjut.

Tidak adanya pemisahan tugas antara pencatatan, penagihan, dan otorisasi piutang menjadi penyebab lain meningkatnya risiko piutang bermasalah. Ketika satu orang memegang lebih dari satu fungsi penting dalam siklus piutang, maka risiko manipulasi atau kelalaian administratif pun meningkat. Auditor menemukan beberapa bukti adanya keterlambatan pelaporan piutang dan ketidaksesuaian antara dokumen penagihan dengan laporan sistem.

Faktor berikutnya adalah kebijakan penyisihan piutang tak tertagih yang tidak didasarkan pada analisis risiko. Manajemen belum memiliki perhitungan sistematis terkait estimasi kerugian piutang, serta belum mengacu pada data historis keterlambatan pembayaran dan mengakibatkan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan secara wajar.

Secara eksternal, keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga seperti asuransi, menjadi salah satu penyebab utama piutang tak tertagih. Proses verifikasi klaim yang lama, ketidaksesuaian dokumen, serta sistem antrean yang rumit menyebabkan dana yang seharusnya diterima dalam waktu singkat, justru tertunda dalam jangka waktu yang lama. Bahkan, beberapa piutang yang telah berusia lebih dari 90 hari belum terkonfirmasi status pembayarannya, sehingga masuk dalam kategori piutang potensial yang tidak dapat ditagih.

Faktor eksternal lainnya adalah rendahnya literasi administrasi pasien umum atau pihak ketiga yang menyebabkan informasi penagihan tidak konsisten atau dokumen pendukung tidak lengkap yang menyebabkan proses klarifikasi menjadi lama dan menghambat kelancaran siklus piutang. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa piutang tak tertagih tidak hanya disebabkan oleh sistem penagihan yang lemah, tetapi juga karena peran pengendalian internal dan faktor eksternal yang belum optimal sehingga tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Puskesmas.

Upaya Meminimalisir Piutang Tak Tertagih

Salah satu langkah utama yang disarankan adalah penguatan prosedur pengendalian internal, terutama pada aspek pemisahan tugas dalam siklus piutang. Proses pencatatan, penagihan, dan otorisasi perlu ditangani oleh unit atau individu yang berbeda untuk mencegah terjadinya kesalahan atau manipulasi data. Dengan membentuk tim khusus atau menunjuk petugas penagihan piutang yang fokus, proses pemantauan dan tindak lanjut dapat berjalan lebih sistematis.

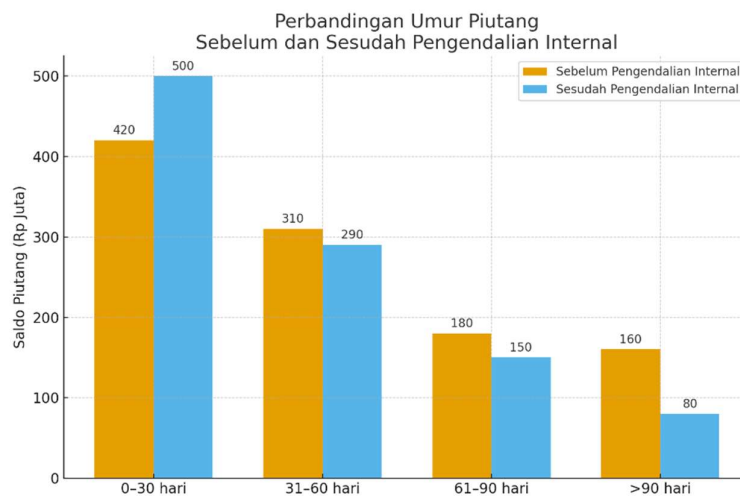
Penerapan sistem informasi keuangan yang terpadu sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pencatatan piutang. Sistem ini dapat dilengkapi dengan fitur *automatic receivables age monitoring (aging schedule)* yang akan

memberikan peringatan dini piutang yang mendekati atau telah jatuh tempo. Sistem yang baik juga memudahkan proses rekonsiliasi antara data klaim dengan pembayaran dari pihak ketiga seperti asuransi.

Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kebijakan pencadangan piutang ragu-ragu berdasarkan data historis dan risiko aktual. Saat ini, pencadangan tidak mengacu pada pola keterlambatan pembayaran atau tingkat kolektibilitas riil. Dengan membangun database historis piutang, manajemen dapat menghitung penyisihan piutang ragu-ragu secara lebih objektif, sehingga nilai piutang dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang realistis.

Puskesmas X juga perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak ketiga, khususnya asuransi. Beberapa piutang terjadi akibat dokumen klaim yang tidak lengkap atau keterlambatan proses verifikasi. Untuk itu, perlu dibuat SOP yang jelas untuk penagihan klaim, serta menetapkan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti klaim hingga pembayaran. Dalam konteks pasien umum, edukasi kepada pasien mengenai kewajiban pembayaran dan kejelasan tagihan sangatlah penting. Upaya ini dapat didukung dengan penyediaan sistem struk dan pengingat pembayaran secara otomatis, baik melalui SMS, WhatsApp, maupun aplikasi internal yang dapat menjangkau pasien secara lebih efektif.

Ditinjau dari aspek audit, Kantor Akuntan Publik dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan realistis bagi Puskesmas untuk membangun sistem yang adaptif terhadap risiko piutang tak tertagih. Selain itu, hasil audit harus dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan prosedur keuangan secara keseluruhan.



Berdasarkan diagram distribusi umur piutang, terjadi penurunan piutang dengan umur lebih dari 90 hari dari Rp160 juta menjadi Rp80 juta setelah penerapan pengendalian internal. Pada saat yang sama, piutang dengan umur 0–30 hari meningkat dari Rp420 juta menjadi Rp500 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem

penagihan dan pemantauan piutang mendorong percepatan pembayaran, sehingga komposisi piutang lebih sehat dan risiko keterlambatan semakin kecil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pengendalian internal dalam pengendalian piutang di Puskesmas X masih belum optimal untuk meminimalisir risiko piutang tak tertagih. Hasil audit menunjukkan masih terdapat kekurangan pada bidang pemisahan tugas, otorisasi transaksi piutang, dan pemantauan umur piutang. Proses penagihan yang belum terstruktur dan sistem informasi piutang yang belum terintegrasi menjadi kendala utama dalam proses rekonsiliasi dan pencatatan. Selain itu, belum adanya dasar perhitungan penyisihan piutang tak tertagih menyebabkan nilai piutang yang dilaporkan tidak mencerminkan nilai realisasi yang sebenarnya. Faktor eksternal seperti keterlambatan pembayaran dari BPJS atau pihak ketiga dan kurangnya pengetahuan tentang administrasi pasien juga memperburuk status piutang.

Puskesmas harus memperkuat pengendalian internal dengan membuat struktur tugas yang jelas dan memisahkan fungsi pencatatan, penagihan, dan otorisasi. Penerapan sistem informasi piutang yang terintegrasi dengan pemantauan umur piutang secara otomatis perlu dilakukan untuk memudahkan pemantauan dan penagihan. Selain itu, penyisihan piutang ragu-ragu perlu dibuat berdasarkan data historis dan tingkat risiko terkini. Puskesmas juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak penjamin, seperti asuransi, untuk mempercepat proses klaim dan pembayaran. Dari sisi audit, Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan strategis sehingga sistem pengendalian internal Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arista, D., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Literature Review Audit Internal). *Jurnal Economina*, 2(6), 1247–1257. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i6.594>
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102. <https://doi.org/10.22225/Kr.12.1.1852.95-102>
- Diana, A. N. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Piutang Pada Kpri Kokardan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi, Dan Kewirausahaan*, 13(1), 19–28. <https://doi.org/10.36418/Coalue.V13i1.996>
- Fauzan, A., & Mustaidah, E. (2021). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan. *Banku: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 2(2), 68–77.
- Fitriargo, B. Y., Sriwidodo, J., & ... (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Piutang Dalam Meminimalkan Piutang Tak Tertagih (Bad Debt) Di Pt Wakabe Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 69–77. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3299672&val=28860&title=Penegakan Hukum Monopoli Persaingan Usaha Dalam Tender Proyek Kerjasama](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3299672&val=28860&title=Penegakan%20Hukum%20Monopoli%20Persaingan%20Usaha%20Dalam%20Tender%20Proyek%20Kerjasama)

- Pemerintah Dengan Badan Usaha Kpbu
- Krisdianti, D., & Supriatna, I. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Persediaan Dengan Menggunakan Kerangka Kerja Coso. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(2), 422–435. <https://doi.org/10.35313/Ialj.V2i2.3375>
- Nugraha, R., Indah Bayunitri, B., & Widyatama, U. (2020). The Influence Of Internal Control On Fraud Prevention (Case Study At Bank Bri Of Cimahi City). *International Journal Of Financial, Accounting, And Management (Ijfam)*, 2(3), 199–211. <https://doi.org/10.35912/Ijfam.V2i3.165>
- Omposunggu, S. G., Salomo, R. V., & Indonesia, U. (2019). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (Jiap)*, 5(1), 78–86.
- Rianingsih, L. P., Saputro, E. P., & Susila, I. (2023). Analisis Efektivitas Manajemen Piutang Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus: Pt Indo Pd Mandiri). *Remik*, 7(1), 810–820. <https://doi.org/10.33395/Remik.V7i1.12165>
- Seftiani, R., & Retnowati, Y. F. (2021). Analisis Pengendalian Internal Piutang Usaha Dalam Meminimalisir Piutang Tak Tertagih Pada Stasiun Tv Xyz. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 116–129. <https://doi.org/10.46306/Rev.V2i1.54>
- Sia, V. N. (2019). Penerapan Model Coso Untuk Fungsi Pengendalian Internal: Studi Pada Agency Administração De Aeroporto E Navegação Aérea De Timor-Leste. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 29(2), 142–169. <https://doi.org/10.20473/Jeba.V29i22019.6220>